

# **IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Cahyo Lukito**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro

JL. Lettu Suyitno, No.2, Kec.Bojonegoro

Email : [lukito\\_cahyo@yahoo.com](mailto:lukito_cahyo@yahoo.com)

## *Abstract*

*Village finance obtained from village income sources must be managed properly in order to achieve village development. Through village fund policies, the economy and community welfare are expected to increase. The budget allocation provided by the government continues to grow, but the increase in the allocation of village funds is actually accompanied by an increase in corruption. The implementation of prioritizing the use of village funds used for community development and development must be in accordance with the rules of the Standard Operational Procedure (SOP), if the village does not have a good SOP it is not possible that the SOP can run well without the HR having the competence in accounting . The type of research used is the type of descriptive research with a qualitative approach. Then the technique of data collection is done by interviews, documentation, and observation. The results and discussion related to the implementation of the Village Financial System in Sumberbendo Village are seen from the Charles O Jones model. The research shows that the three indicators of Siskuedes policy implementation can work well, because in the implementation of Siskuedes Sumberbendo Village has reported its finances with the Siskudes application. The obstacle in the implementation of Siskuedes is the internet network for villages that have not been accessed by the internet and still need facilitators or facilitators from the Bubulan District team.*

*Keywords: Standard Operating Procedures, effective and efficient*

## **Abstrak**

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah terus bertambah namun peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi. Pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat harus sesuai dengan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP), apabila desa tidak mempunyai SOP yang baik tidak mungkin SOP ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberbendo yaitu dilihat dari model Charles O Jones penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskuedes dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskuedes sampai saat ini Desa Sumberbendo sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskudes. Hambatan dalam pelaksanaan Siskuedes ini adalah jaringan internet untuk desa yang belum terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim Kecamatan Bubulan.

**Kata Kunci :** Standar Operasional Prosedur, efektif dan efisien

## PENDAHULUAN

Keuangan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa yang maksimal. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah. Pada tahun 2017 total dana desa seluruh Indonesia dari APBN sebesar Rp. 60 triliun, bertambah Rp13,1 triliun dari tahun sebelumnya. Jika dibagi rata, setiap desa setidaknya akan mengelola uang sebesar Rp 800 juta.

Kenyataan yang terjadi saat ini terkait Pengelolaan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa ini, antara lain (1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya *skill* (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). (Hanifah dan Praptoyo dalam *Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)*, 2015) Faktor penghambat lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Bagi Kepala Desa hendaknya tidak memegang kendali penuh terhadap keuangan desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri nomor 145 /8350/BPD tanggal 27 November 2015 perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut "SISKEUDES", yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama 'SIMDA Desa'. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa ini Pemerintah Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yaitu Kasi Pemerintahan Kecamatan Bubulan menyampaikan bahwa dari 5 desa yang ada di Kecamatan Bubulan seluruh desanya telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa ini dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, artinya aplikasi siskeudes ini terbukti dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Setelah diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa ini di Kabupaten Bojonegoro ternyata masih terdapat beberapa kendala yaitu masih kurangnya pelatihan dalam menjalankan aplikasi dan sumber daya yang kurang memadai dalam aplikasi Siskeudes tersebut walaupun di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Kecamatan Bubulan program ini sudah berjalan. Dari beberapa desa di Kecamatan Bubulan Peneliti memilih Desa

Sumberbendo karena di antara desa yang berada di Kecamatan Bubulan Desa Sumberbendo adalah Desa yang paling cepat dalam menyelesaikan laporan keuangan desanya laporan APBDes dengan menggunakan aplikasi siskeudes, namun kenyataannya masih ditemukan banyak kendala teknis.

Peneliti tertarik untuk menganalisis Desa Sumberbendo dalam mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa ini disebabkan karena desa Sumberbendo tersebut adalah desa tercepat dalam menyelesaikan input APBDes di Kecamatan Bubulan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Siskeudes di desa Sumberbendo dengan judul **“Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro”**

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2016:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.

Tipe deskriptif menurut Sugiyono (2016:11) adalah tipe yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri,

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman bagaimana implementasi program Siskeudes di Desa Sumberbendo dalam melaporkan keuangan desa melalui proses wawancara mendalam kepada aparatur pemerintah Kecamatan Bubulan dan Desa Sumberbendo dan hambatan-hambatan yang terkait, serta data-data lainnya yang peneliti dapatkan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN APBDes Desa Sumberbendo Tahun 2017**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

- Pendapatan Desa : Rp. 1.440.345.800,-
- a) Pendapatan Asli Desa : Rp. 70.020.700,-
  - b) Anggaran Dana Desa : Rp. 416.940.100,-
  - c) Dana Desa : Rp. 762.985.600,-
  - d) BPH Pajak dan Retribusi : Rp. 18.920.000,-
  - e) Gotong Royong dan Swadaya : Rp. 5.000.000,-
  - f) DAK Pendidikan : Rp. 140.500.000,-
- Belanja : Rp. 1.440.345.800,-
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 378.478.500,-
  - b. Bidang Pembangunan : Rp. 575.579.000,-
  - c. Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp. 274.720.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 208.933.200,-
  - e. Bidang Tak Terduga : Rp. 2.635.400,-

## **Implementasi Analisis Implementasi Sistem Keuangan Desa**

Temuan Hasil Penelitian tentang implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumberbendo yang menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sumberbendo sehubungan dengan tiga aktivitas yang berhubungan dengan implementasi menurut Charles O. Jones yaitu :

### **Organisasi**

Sebagaimana diketahui dalam penyajian data, didalam organisasi terdapat berbagai unsur diantaranya sumber daya, rata-rata pendidikan pengelola sistem keuangan desa di Desa Sumberbendo adalah cukup sebagai syarat yaitu rata-berijazah SLTA dengan Sekretaris Desa seorang Sarjana dan mempunyai pengalaman sebagai koordinator dirasa cukup dalam segi SDM, dari hasil wawancarapun dirasa sangat cukup dari segi SDM, hanya kurang dibagian Kepala Seksi yang notabnya berusia diatas 50 tahun akan tetapi dibantu oleh Kepala Dusun yang berusia cukup muda karena masih berkeinginan untuk lebih baik lagi. Dalam segi pelaporan ditinjau dari hasil wawancara bahwa pengelola sistem keuangan desa masih sering berkordinasi dengan tenaga Pendamping Desa, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan sarana-prasarana yang cukup dimana peneliti menemukan bahwa belum ada Laptop kantor dan juga sarana internet sebagai penunjang wawasan serta pelaporan administrasi pembangunan di Desa.

Didalam organisasi pengelola keuangan desa diungkapkan bahwa data hasil penelitian mengenai SDM pengelola disebutkan bahwasanya usia pengelola antara 30 sampai 55 tahun, masih diantara usia produktif dan mengenai pendidikan juga cukup untuk melaksanakan pengelolaan dengan baik, hanya Kepala Seksi yang dirasa kurang dalam segi kemampuannya, sedangkan dari hasil

penelitian mengenai penerapannya, sumber daya yg ada dikantor Desa Sumberbendo sangatlah belum memadai karena tidak ada laptop milik Kantor Desa sumberbendo.

Sedangkan dari hasil pengalaman, sudah ada Sekretaris Desa Sumberbendo yang notabnya sudah bekecimpung cukup lama didalam Pemerintahan Desa yang dapat mengkoordinasi seluruh pengelola sesuai dengan tanggungjawabnya dan dibantu Kepala Desa sebagai Penanggungjawab penuh.

Tetapi dalam hal ini belum diimbangi oleh pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui bahwa Sistem Keuangan Desa di Sumberbendo haruslah diawasi semua pihak.

### **Interpretasi**

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti diperoleh sehubungan dengan pemahaman dengan tugas-tugas pengelola dan juga pengawas tidaklah menemukan keseimbangan, ditinjau dari pengamatan bahwasanya pengelola sistem keuangan desa di Desa Sumberbendo dapat dikatakan cukup, karena keseluruhan PTPKD telah mengerti tugasnya hanya pelaksana teknis yaitu Kepala Seksi yang mengerti tugasnya tetapi belum bisa melaksanakannya dikarenakan keterbatasan kemampuan.

Mengenai hasil tentang pemahaman dari pihak-pihak terkait sudah sangat baik, dari hasil wawancara diperoleh bahwasanya Kaur Keuangan juga sudah menjadi Bendahara sesuai tugasnya dan dengan diawasi Sekretaris Desa dan Kepala Desa sebagai penanggungjawabnya, tetapi dari segi teknis belum sesuai dikarenakan Operator Siskeudes yang seharusnya dipegang oleh Sekretaris Desa dan dibantu Kepala Seksi dipegang oleh Kasun Sumorlo Bapak Imam Budiono.

### **Aplikasi**

BPKP telah memfasilitasi pengelola sistem keuangan desa di seuruh daerah dengan meluncurkan aplikasi Siskeudes

secara gratis sebagai pembantu dalam pelaporan keuangan desa.

Diperoleh bahwa di Desa Sumberbendo pelaporan terkait penggunaan Aplikasi sudah cukup sesuai dengan permintaan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan, tetapi diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan aplikasi ini belum sempurna karena hanya profil dan menu penganggaran saja yang digunakan di Desa Sumberbendo karena keterbatasan jaringan.

Terkait dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumberbendo, bahwa penggunaan Siskeudes sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa sangatlah membantu seperti data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara bahwa berkat adanya Siskeudes pekerjaan haruslah ada perencanaannya terlebih dahulu, serta kelengkapan menu yang ada pada aplikasi ini sangatlah membantu pengelola keuangan desa, dan pengelola keuangan desa di Desa Sumberbendo pun telah menggunakannya dengan cukup baik walaupun terkendala oleh sarana prasarana yang ada di Kantor Desa Sumberbendo.

Diketahui bahwa penerapan pelaporan APBDesa sudah difasilitasi oleh BPKP dengan Aplikasi tatakelola keuangan desa yaitu Aplikasi Siskeudes, dari segi penerapannya di Desa Sumberbendo sudah cukup baik dan sudah diimplementasikan dengan cukup seperti yg dikemukakan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Bubulan, hanya saja kurang dalam hal sarana-prasarana yang belum memadai sehingga pelaporan secara online masih terkendala.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menyampaikan laporan keuangan, jika dilihat dari indikator yang telah dikemukakan oleh Charles O.Jones yaitu selama proses pelaksanaan Implementasi

program Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberbendo:

### **1. Tahap Pengorganisasian**

Pelaksana atau *brainware* yang menjalankan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) juga menunjukkan kemampuan yang cukup. Adapun, dari segi sarana dan prasarana pelaksanaan Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberbendo dapat dikatakan belum memadai.

### **2. Tahap Interpretasi**

Selain itu, prosedur kerja yang dilaksanakan selama proses pengimplementasian Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberbendo sudah dijalankan sesuai dengan perundang-undangan hanya kurang dari segi teknis yang belum sesuai.

### **3. Tahap Aplikasi**

Secara keseluruhan Implementasi program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sumberbendo sudah mencapai tujuan pengaplikasian Sistem Keuangan Desa yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu untuk membantu aparatur desa dalam membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel secara efektif dan efisien, hanya terkendala sedikit dibagian pengawasan karena belum tersedia jaringan online di Desa Sumberbendo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

Agus Purwanto Erwan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2015.

Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Kusdi, *Teori Organisasi dan Administrasi*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2016.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

*Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

*Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.

Riant Nugroho, *Public Policy*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Anggara Sahya, *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.

### **Peraturan-Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014

PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Desa Sumberbendo Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

SK Kepala Desa tentang PTPKD Nomor: 188/10/KEP/412.51.25.04/2017

### **Sumber lainnya :**

<http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-mengepung-desa>

<http://www.bpkp.go.id>

